

Nomor : 59/PM.00.02/K.SB-09/08/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 02 Agustus 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik
Kabupaten Sijunjung, (terlampir)

Di

Tempat

Dasar hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
5. Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bekenaan dengan hal diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
5. Memperhatikan dokumen pendaftaran yang diserahkan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana berikut:
 - a. surat pendaftaran;
 - b. surat pernyataan MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL; dan
 - c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari SIPOL.
6. Memperoleh tanda terima dan berita acara penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU.
7. Memperoleh tanda terima pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **tidak lengkap dan dikembalikan** oleh KPU.
8. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sesuai dengan peraturan yang ditetapkan .
9. Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.
2. Arsip.

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	PARTAI POLITIK	STATUS PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	PARTAI NASIONAL
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	PARTAI NASIONAL
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	PARTAI NASIONAL
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	PARTAI NASIONAL
5	PARTAI NASDEM	PARTAI NASIONAL
7	PARTAI BERKARYA	PARTAI NASIONAL
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	PARTAI NASIONAL
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	PARTAI NASIONAL
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	PARTAI NASIONAL
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	PARTAI NASIONAL
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	PARTAI NASIONAL
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	PARTAI NASIONAL
14	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASIONAL
15	PARTAI BULAN BINTANG	PARTAI NASIONAL
16	PARTAI UMMAT	PARTAI NASIONAL
17	PARTAI GELORA	PARTAI NASIONAL
18	PARTAI MASYUMI	PARTAI NASIONAL